

MOBILITAS SOSIAL DAN DEMOKRASI

Oleh Nurcholish Madjid

Ada suatu kejadian kecil dan sederhana yang dapat kita amati sehari-hari, yang menggambarkan bagaimana kepentingan yang telah tertanam sangat mempengaruhi mekanisme mobilitas sosial. Kejadian kecil itu khususnya yang ada di kota-kota besar: Jika seseorang kebetulan menunggu bis kota di halte, dan bis yang ditunggunya itu tiba maka ia akan selalu mempunyai alasan untuk naik dan masuk kendaraan itu sekalipun penuh sesak. Tetapi jika ia sudah berada di dalamnya, dan bis itu berhenti pada halte berikutnya untuk memberi kesempatan pada penumpang-penumpang lain naik ke atas, maka ia akan selalu mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa kendaraan sudah penuh dan tidak ada tempat bagi penumpang-penumpang baru!

Itulah kepentingan yang tertanam atau *vested interest*. Sifat *vested interest* itu senantiasa tirani dan tentu egoistis. Bagi orang yang berdiri di tepi jalan atau halte mempunyai kepentingan untuk naik bis. Maka ia akan berusaha memenuhi kepentingannya itu sebisa-bisanya. Dan bagi yang sudah berada di dalam bis ada kepentingan untuk mempertahankan situasi yang menyenangkan dalam bis itu dan kemudian cenderung untuk menolak penumpang-penumpang baru!

Dalam masyarakat yang lebih kompleks pun pola-pola itu sedikit-banyak juga berlaku. Meskipun tidak setiap orang itu egois sampai batas yang zalim, namun tirani *vested interest* itu senantiasa menjadi penghalang bagi terjadinya proses mobilitas sosial yang

lancar, khususnya dalam dimensinya yang vertikal. Yaitu bahwa pergeseran-pergeseran dalam suatu proses perubahan susunan kemasyarakatan dari bawah ke atas akan senantiasa terhambat oleh kalangan-kalangan yang timbul dari mereka yang sudah berada di atas. Kadang-kadang halangan-halangan itu sudah memperoleh sublimasi begitu rupa sehingga pola sosial yang timbul karenanya mendapatkan pengesahan dari masyarakat sendiri dan kemudian diakui sebagai wajar.

Contohnya ialah sistem kasta dalam masyarakat India. Sistem yang pada hakikatnya mengakibatkan tetap dipertahankan strata sosial yang berlaku sehingga tidak lagi memungkinkan terjadinya perubahan yang berarti itu memperoleh sublimasi begitu rupa sehingga dianggap menjadi bagian dari kesucian ajaran agama. Disebabkan oleh adanya finalitas dan kemutlakan nilai-nilai keagamaan — sesuai dengan klaim suatu agama — maka lembaga kasta tersebut menjadi tak mungkin atau sulit sekali dipersoalkan, apalagi diubah. Dan setiap percobaan untuk mengubahnya akan membutuhkan alat pembenaran yang lebih unggul, serta senantiasa menimbulkan guncangan-guncangan.

Demikian pula mitos-mitos bahwa keturunan orang-orang atau keluarga-keluarga tertentu mempunyai sifat-sifat yang luhur sebagai pembawaan sejak lahir sehingga dengan sendirinya berhak atas tempat-tempat pada strata sosial bagian atas merupakan cara-cara yang diciptakan — baik sadar maupun tidak — dengan tujuan mempertahankan pembagian tingkat kemasyarakatan yang berlaku. Ia pun berperan menghambat mobilitas sosial. Lembaga-lembaga itu biasanya disebut sebagai feodalisme.

Asumsi dasar demokrasi ialah persamaan mutlak antara manusia sesamanya. Terkenal sekali sepotong kalimat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, “*that all men are created equal*” (bahwa semua manusia adalah diciptakan sama). Justru egalitarianisme atau paham kesamaan ini merupakan pokok paham perikemanusiaan. Maka setiap bentuk paham yang mengingkari kesamaan dasar adalah bertentangan dengan perikemanusiaan dan demokrasi.

Konsistensi paham kesamaan itu ialah adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mobilitas sosial. Yaitu bahwa setiap orang berhak atas kesempatan memperoleh derajat kehidupan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan yang bersifat a priori seharusnya tidak ada. Dasar penilaian atas seseorang tidak pada hal-hal yang ia sendiri tidak berkuasa atasnya seperti kasta, keturunan, warna kulit ataupun afinitas-afinitas yang dimilikinya, melainkan pada kualitas-kualitas yang ada pada dirinya menurut kenyataan yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan dan prestasi-prestasi.

Disertai dengan keadilan sosial, demokrasi menghendaki terbagi meratanya secara relatif hal-hal yang akan berpengaruh pada usaha pencapaian martabat kemanusiaan yang setinggi-tingginya, di mana antara lain yang terpenting ialah di bidang ekonomi, kesempatan kerja dan lebih-lebih lagi pendidikan. Yang tersebut belakangan ini amat besar peranannya dalam mendorong terjadinya proses perubahan dan mobilitas sosial. Karena itu pendidikan lebih merupakan hak daripada kewajiban rakyat. Sebagai hak, pendidikan merupakan tuntutan rakyat. Dalam memenuhi tuntutan itu setiap sektor masyarakat memikul kewajiban-kewajiban, baik rakyat sendiri maupun pemerintah. Dan akses atau jalan masuk ke dalam pendidikan itu tidak dibenarkan terhalang oleh hal-hal yang tidak bersangkutan dengan potensi prestasi seperti kemampuan ekonomis, status sosial, dan sebagainya. Bila tidak demikian maka mobilitas sosial selanjutnya akan terhalang. Hendaknya kita tidak membiarkan tumbuhnya bentuk feodalisme baru yang akan membahayakan demokrasi. [❖]